

Perancangan Sistem Informasi E-Landu (Elektronik Layanan Terpadu) Di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II Berbasis Web

Muhammad Hilmi

Email: muhammadhilmi@gmail.com

Universitas Teknologi Sapta Mandiri

Abstract: Sistem Informasi Elektronik Layanan Terpadu (E-LANDU) merupakan system berbasis web yang di gunakan untuk mengelola proses akses pelayanan sekali klik langsung di arahkan ke layanan website yang di inginkan. Adapun jenis website pelayanan di antaranya adalah, E-raterang, SISUPER, Wa Center, SIWAS, E- Berpadu. Pengaksesan Website di Pengadilan Negeri Paringin masih acak atau satu persatu sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pelayanan yang akan di lakukan dengan baik. Atas dasar permasalahan tersebut di bangunlah sebuah Sistem Informasi (E-LANDU) Elektronik Layanan Terpadu di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II Berbasis Website yang di lengkapi basis data website yang akan di akses, sehingga dapat memudahkan pihak Instansi ataupun pengunjung dengan efektif dan efisien, selain itu system informasi ini dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan Pegawai ataupun Pengunjung dalam melakukan pencarian ataupun pendaftaran pelayanan yang mereka butuhkan dengan cepat. Sistem Informasi E-LANDU ini menggunakan metode pengembangan Waterfall yang di mulai dari tahap (requirement analisis), system design, implementation, integration and testing, serta maintenance. Menggunakan Bahasa pemrograman PHP, database MySQL. Dengan metode pengujian Blackbox dan MOS (Mean opinion score) yang membuktikan bahwa 80-90% sistem telah bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna yang di tentukan..

Keywords: MySQL, Pelayanan terpadu, system Informasi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas (Setiawan, 2023). Sebagai lembaga pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Paringin tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan. Laporan tersebut berisi pengukuran capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semua kinerja harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai perencanaan dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembuatan laporan ini juga dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan akuntabilitas, sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 3112/SEK/0T.01.1/12/2021 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor: W15.U/3258/PR.01.04/12/2021 perihal penyampaian dokumen SAKIP. (Profil Pengadilan, 2022)

Pengadilan Negeri Paringin saat ini menempati gedung sementara yang berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Balangan, yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Yang Mana Gedung ini masih ikut berdampingan dengan Dinas perpustakaan, Dinas Kearsipan dan UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan. Saat ini gedung permanen untuk Pengadilan Negeri Paringin masih dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Dengan begitu jika Gedung yang baru telah selesai sepenuhnya maka akan sesegeranya berpindah ke Gedung baru.

Alasan kenapa penulis memilih tempat Penelitian proposal di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II, karena dimana tempat tersebut menurut penulis adalah tempat Penelitian proposal yang tepat untuk bahan proposal penelitian dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II. Selama ini pelayanan elektronik masih melakukan pencarian secara satu persatu website yang akan di akses maka dari itu tujuan saya melakukan penelitian untuk mempermudah atau mempersingkat metode pencarian hanya dengan sekali klik dapat mengakses semua layanan yang ada dan tinggal memilih layanan mana yang kita inginkan dengan menggunakan Metode Waterfall (Ni Putu Nadia et al, 2023). Dari hal diatas, Peneliti bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh Institut Sapta Mandiri dalam menyelesaikan S-1, maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan tugas tersebut melalui penelitian yang mana tempat untuk melaksanakan penelitian ialah di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II.

Lewat Observasi yang dilakukan di Pengadila (E-LANDU) yang ada dari latar belakang tersebut maka penulis akan membahas penelitian dengan judul tentang : "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI E-LANDU (Elektronik Layanan Terpadu) DI PENGADILAN NEGERI PARINGIN KELAS II BERBASIS WEB".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan tahapan yang terstruktur dan sistematis, yang diawali dengan penentuan topik pembahasan serta judul yang akan dibuat. Proses ini melibatkan kajian awal terhadap permasalahan yang ada di lapangan untuk memastikan relevansi penelitian. Pemilihan topik dan judul dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan melalui penelitian. Dalam tahap ini juga dilakukan pemetaan awal terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian. Penentuan scope penelitian juga menjadi bagian penting dalam tahap ini untuk memastikan penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

Tinjauan pustaka dan studi menjadi langkah fundamental dalam membangun pemahaman komprehensif tentang penelitian yang akan dilakukan. Proses ini melibatkan penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian yang dapat diisi. Tinjauan pustaka juga membantu dalam memahami berbagai pendekatan dan metodologi yang telah digunakan dalam penelitian serupa. Pemahaman mendalam tentang teori-teori yang relevan menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka konseptual penelitian.

Tahap proses dan perancangan arsitektur sistem merupakan fase krusial yang menentukan keberhasilan pengembangan sistem. Dalam tahap ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Arsitektur sistem dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan non-teknis yang mempengaruhi kinerja sistem. Setiap komponen dalam arsitektur sistem didesain dengan mempertimbangkan interkoneksi dan interdependensi antar komponen. Dokumentasi arsitektur sistem dibuat secara detail untuk memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang. Pertimbangan skalabilitas dan fleksibilitas sistem juga menjadi fokus dalam perancangan arsitektur.

Metode penelitian yang dipilih menjadi kerangka kerja dalam pelaksanaan penelitian, dengan pendekatan waterfall yang memberikan struktur sistematis dalam pengembangan sistem. Metode ini dipilih karena memberikan tahapan yang jelas dan terukur dalam proses pengembangan. Setiap fase dalam metode waterfall dilaksanakan secara berurutan untuk memastikan kualitas hasil pengembangan. Dokumentasi yang detail pada setiap tahap memudahkan proses tracking dan evaluasi progress penelitian. Pendekatan ini juga

memungkinkan adanya kontrol kualitas yang baik pada setiap tahap pengembangan.

Identifikasi pengguna sistem menghasilkan empat kategori utama: masyarakat, admin, sekretaris, dan kepala instansi, masing-masing dengan peran dan hak akses yang berbeda. Pembagian peran ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan keamanan sistem. Setiap kategori pengguna memiliki kebutuhan spesifik yang harus diakomodasi dalam sistem. Pemetaan kebutuhan pengguna dilakukan secara detail untuk memastikan sistem dapat memenuhi ekspektasi setiap kategori pengguna. Interface sistem dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kategori pengguna.

Masyarakat sebagai pengguna utama sistem memiliki akses terhadap berbagai fitur penting dalam pengajuan administrasi dan layanan. Mereka dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem menggunakan kredensial yang unik. Sistem menyediakan interface yang user-friendly untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan berbagai jenis surat dan dokumen administratif. Masyarakat juga dapat melakukan tracking terhadap status pengajuan mereka secara real-time melalui sistem. Fitur notifikasi diimplementasikan untuk memberikan update otomatis kepada masyarakat terkait progress pengajuan mereka.

Admin sistem diberikan hak akses komprehensif untuk mengelola seluruh aspek operasional sistem. Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola akun pengguna termasuk pembuatan, modifikasi, dan penonaktifan akun. Admin dapat memverifikasi dan memproses pengajuan surat yang masuk ke dalam sistem. Mereka juga bertanggung jawab dalam memantau dan mengelola alur kerja sistem secara keseluruhan. Dashboard khusus disediakan bagi admin untuk memudahkan monitoring dan pengelolaan sistem. Admin juga dapat menghasilkan berbagai laporan terkait aktivitas sistem.

Sekretaris berperan penting dalam alur verifikasi dan approval dokumen dalam sistem. Mereka memiliki akses khusus untuk mereview dan memvalidasi dokumen-dokumen yang telah diajukan. Sistem menyediakan tools khusus bagi sekretaris untuk mengelola dan mengorganisir dokumen yang memerlukan persetujuan. Sekretaris dapat memberikan catatan atau komentar terhadap dokumen yang direview. Interface khusus disediakan untuk memudahkan sekretaris dalam mengelola antrian dokumen yang perlu diproses.

Kepala instansi diberikan akses terhadap dashboard eksekutif yang menampilkan berbagai metrics dan KPI sistem. Mereka dapat melihat statistik dan tren pengajuan surat secara real-time. Dashboard ini dilengkapi dengan fitur analitik yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Kepala instansi dapat memonitor kinerja sistem dan efektivitas layanan secara keseluruhan. Sistem juga menyediakan fitur pembuatan laporan eksekutif untuk keperluan evaluasi dan perencanaan.

Kebutuhan fungsional sistem dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kebutuhan pengguna. Setiap fitur dikembangkan berdasarkan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada. Sistem memastikan bahwa setiap fungsi dapat diakses dan digunakan sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Dokumentasi kebutuhan fungsional dibuat secara detail untuk memudahkan proses pengembangan. Testing dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap fungsi bekerja sesuai dengan spesifikasi.

Data Flow Diagram dikembangkan dalam tiga level untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang aliran data dalam sistem. Level 0 memberikan gambaran konteks sistem secara keseluruhan. Level 1 mendetailkan proses-proses utama dalam sistem beserta aliran datanya. Level 2 memberikan detail lebih mendalam tentang subproses dalam setiap proses utama. DFD membantu dalam memvisualisasikan kompleksitas sistem secara terstruktur.

Entity Relationship Diagram dirancang untuk memodelkan struktur basis data sistem secara komprehensif. ERD menggambarkan hubungan antar entitas beserta kardinalitasnya. Setiap entitas didefinisikan dengan atribut-atribut yang relevan untuk mendukung fungsi sistem. Relasi antar entitas dirancang dengan mempertimbangkan integritas referensial dan normalisasi data. Dokumentasi ERD dibuat secara detail untuk memudahkan implementasi basis data.

Implementasi basis data menggunakan pendekatan relasional dengan mempertimbangkan aspek performa dan skalabilitas. Tabel-tabel dirancang dengan memperhatikan normalisasi untuk menghindari redundansi data. Indeks dibuat pada kolom-kolom yang sering digunakan dalam query untuk mengoptimalkan performa.

Constraint dan trigger diimplementasikan untuk menjaga integritas data. Backup dan recovery strategy dirancang untuk menjamin keamanan data.

Perancangan interface sistem menggunakan pendekatan user-centered design untuk memastikan kemudahan penggunaan. Wireframe dikembangkan untuk setiap halaman utama sistem sebagai blueprint interface. Desain responsif diimplementasikan untuk memastikan sistem dapat diakses dari berbagai perangkat. Testing usability dilakukan untuk memastikan interface mudah digunakan dan intuitif. Feedback dari pengguna diintegrasikan dalam proses iterasi desain interface.

Jadwal penelitian disusun secara detail mencakup periode enam bulan pengerjaan dengan milestone yang jelas. Setiap fase pengembangan dialokasikan waktu yang proporsional sesuai dengan kompleksitasnya. Timeline dirancang dengan mempertimbangkan dependencies antar aktivitas. Regular checkpoint direncanakan untuk monitoring progress penelitian. Contingency time dialokasikan untuk mengantisipasi potensi delay dalam pengerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dihasilkannya sebuah Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Negeri Paringin Kelas II yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem yang dihasilkan adalah untuk mempermudah akses pelayanan yang mana sebelumnya di akses secara satu persatu namun sekarang dapat di akses hanya dalam satu website yang semuanya berbasis online dan bisa di akses dimana saja.

Halaman Utama



Gambar 4.1 Halaman Utama

Halaman utama yakni halaman yang pertama kali tampil saat mengakses sistem. Gambar 4.1 menunjukkan menu yang terdapat berbagai macam menu yang terdapat dalam sistem, menu login difungsikan untuk melakukan akses login kesistem sesuai dengan level user pengguna.

Form Pelayanan



Gambar 4.2 Form Pelayanan

Form Pelayanan yakni sebagai tempat untuk menerima masukan dari pengguna yang selanjutnya akan disimpan kedalam database. Sebagai contoh pada Gambar 4.1 ialah form pelayanan seperti wa center, e- berpadu (elektronik layanan terpadu) E-Raterang (Permohonan Surat Keterangan) dan SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) form yang digunakan untuk melakukan komunikasi ataupun layanan yang sesuai dengan apa yang di perlukan.

Halaman Login

The image shows a login form with a white background and a thin grey border. It contains two input fields: 'Email' and 'Password', both with 'Value' placeholder text. Below the password field is a black 'Sign In' button. At the bottom left, there is a link labeled 'Forgot password?'.

Gambar 4.3 Halaman Login

Halaman Login yakni halaman yang difungsikan untuk melakukan autentifikasi sistem. Seperti Gambar 4.3 agar dapat masuk ke dashboard atau dapat melakukan pengajuan pelayanan user diharuskan untuk memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Dashboard Admin



Gambar 4.3 Dashboard Admin

Dashboard admin yakni laman yang digunakan sebagai landing page dengan level pengguna admin saat melakukan login sebelumnya. Sesuai dengan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dashboard ini digunakan sebagai kustomisasi website pelaporan dan bantuan.

Dashboard Masyarakat



Gambar 4.5 Dashboard Masyarakat WA

Dashboard Masyarakat wa center yaitu jika ingin melakukan komunikasi dengan admin pengadilan Negeri Paringin Kelas II seperti pertanyaan dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan awal Ketika mengklik wa center di form pelayanan.



Gambar 4.6 Dashboard Masyarakat e-berpadu

Dashboard layanan e-berpadu (elektronik layanan terpadu) memuat informasi berkas pidana antar penegak hukum untuk melakukan layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana Elektronik, permohonan penetapa Diversi, Izin besuk tahanan online oleh Masyarakat tanpa harus datang langsung ke pengadilan Negeri Paringin Kelas II. Gambar 4.6 adalah tampilan saat pertama kali masuk ke e-berpadu setelah mengklik layanan e-berpadu pada form pelayanan.



Gambar 4.7 Dashboard Masyarakat eraterang

Dashboard eraterang yaitu pelayanan permohonan surat keterangan pada pengadilan Negeri Paringin Gambar 4.7 adalah tampilan awal eraterang disaat pertama kali mengklik akses eraterang di form pelayanan.



Gambar 4.8 Dashboard Masyarakat SIWAS

Dashboar Masyarakat SIWAS (Sistem Innformasi Pengawasan) Gambar 4.8 adalah tampilan yang pertama kali muncul saat melakukan klik SIWAS di form pelayanan

Pembahasan yaitu penjabaran atau penjelasan dari hasil secara lebih rinci Adapun pembahasan meliputi halaman utama, form pelayanan, halaman login, Dashboard admin, Dashboard Masyarakat, (WA Center, e-berpadu (elektronik layanan terpadu), Eraterang (pelayanan permohonan surat keterangan), dan SIWAS (Sistem Innformasi Pengawasan)). Dari hasil di atas dapat kita bahas satu persatu agar lebih jelas sertra rinci mengenai hasil demo program yang di dapat.

Halaman utama

Halaman utama yakni halaman yang pertama kali tampil saat mengakses sistem. Pada Gambar 4.1 , halaman ini merupakan tampilan awal system atau beranda system sebelum masuk ke form-form selanjutnya

Form Pelayanan

Form Pelayanan yakni sebagai tempat untuk menerima masukan dari pengguna yang selanjutnya akan disimpan kedalam database. Sebagai contoh pada Gambar 4.1 ialah form pelayanan seperti wa center, e- berpadu (elektronik layanan terpadu) E-Raterang (Permohonan Surat Keterangan) dan SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) form yang digunakan untuk melakukan komunikasi ataupun layanan yang sesuai dengan apa yang di perlukan.

Halaman Login

Halaman Login yakni halaman yang difungsikan untuk melakukan autentifikasi sistem. Seperti Gambar 4.3 agar dapat masuk ke dashboard atau dapat melakukan pengajuan pelayanan user diharuskan untuk memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Dashboard Admin

Dashboard admin yakni laman yang digunakan sebagai landing page dengan level pengguna admin saat melakukan login sebelumnya. Sesuai dengan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dashboard ini digunakan sebagai kustomisasi website pelaporan dan bantuan.

Dashboard Masyarakat

Dashboard Masyarakat yaitu halaman yang ditampilkan Ketika Masyarakat mengklik salah satu pilihan pada form pelayanan yang mana akan di arahkan langsung pada halaman pada Gambar 4.5 Gambar 4.6 Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.

Halaman WA Center

Dashboard Masyarakat wa center Ketika Masyarakat memerlukan bantuan admin pengadilan Negeri Paringin Kelas II seperti pertanyaan dan lain sebagainya bisa dilihat pada Gambar 4.5

Halaman e-berpadu

Dashboard layanan e-berpadu (elektronik layanan terpadu) memuat informasi berkas pidana antar penegak hukum untuk melakukan layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana Elektronik, permohonan penetapa Diversi, Izin besuk tahanan online oleh Masyarakat tanpa harus datang langsung ke pengadilan Negeri Paringin Kelas II. Gambar 4.6 adalah tampilan saat pertama kali masuk ke e-berpadu setelah mengklik layanan e-berpadu pada form pelayanan. Dan ini di akses apabila Masyarakat memerlukan pelayanan e-berpadu tersebut

Halaman Eraterang

Dashboard eraterang yaitu pelayanan permohonan surat keterangan pada pengadilan Negeri Paringin Gambar 4.7 adalah tampilan awal eraterang disaat pertama kali mengklik akses eraterang di form pelayanan. Yang mana Masyarakat memerlukan akses layanan tersebut harus melakukan pendaftaran dahulu menggunakan email dan password yang di buat oleh Masyarakat itu sendiri atau jika kurang menegerti bisa langsung menghubungi admin Pengadilan Negeri Paringin Kelas II jika memerlukannya.

Halaman SIWAS

Dashboar Masyarakat SIWAS (Sistem Innformasi Pengawasan) Gambar 4.8 adalah tampilan yang pertama kali muncul saat melakukan klik SIWAS di form pelayanan, Halaman ini memerlukan akun atau sudah terdaftar sebelumnya jika belum memiliki bisa melakukan register terlebih dahulu.

Pengujian Blackbox

Berdasarkan pengujian blackbox diperoleh hasil bahwa sistem ini telah berjalan dengan baik akan tetapi sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur upload untuk bukti-bukti pendukung pembuatan surat serta menambahkan fitur verifikasi dari perangkat yang ada di Pengadilan Negeri Parimgim Kelas II lainnya, terkait ketidak lengkapannya sebuah pengajuan untuk disetujui.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, Sistem Informasi E-LANDU (Elektronik Layanan Terpadu) di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II telah menunjukkan berbagai manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem ini hadir sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang, memberikan solusi modern dalam pengelolaan layanan administrasi pengadilan.

Implementasi E-LANDU telah membuka paradigma baru dalam sistem pelayanan di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II. Sebagai sebuah alternatif dari sistem konvensional,

E-LANDU menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam pengelolaan layanan administratif. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Melalui platform web yang telah dikembangkan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memberikan transparansi yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Efektivitas dan efisiensi menjadi nilai tambah yang signifikan dari implementasi E-LANDU. Sistem ini telah terbukti mampu mengoptimalkan proses pelayanan dari segi waktu dan sumber daya. Otomatisasi berbagai proses administratif telah mengurangi waktu tunggu dan meminimalisir potensi kesalahan dalam pengolahan data.

Komputerisasi melalui E-LANDU telah menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi berbagai kendala pelayanan konvensional. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan tetapi juga meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data dan informasi. Integrasi teknologi informasi dalam sistem pelayanan telah membawa perubahan positif dalam kinerja institusi secara keseluruhan.

Keberhasilan implementasi E-LANDU di Pengadilan Negeri Paringin Kelas II menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan publik bukan hanya sebuah pilihan tetapi telah menjadi kebutuhan. Sistem ini telah membuktikan bahwa teknologi informasi dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, dan mengoptimalkan kinerja institusi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- (Widiastuti, 2022) Alfonsius, E., Ngangi, S.W.C. and Lagimpu, C.F. (2023) 'Sistem Informasi Layanan Surat Bebas Pustaka Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berbasis Website', pp. 66–74.
- Belakang, A.L. (2022) *Profil Pengadilan Negeri Paringin Kelas II A. latar belakang. 2022nd edn, Profil Pengadilan Negeri Paringin 2022. 2022nd edn.* Edited by P.N.P.K. II. Paringin, Balangan: Sinar Puspita A, Md. Available at: <https://pn-paringin.go.id/>.
- Informatika, J. *et al.* (2019) 'SISTEM INFORMASI PELAYANAN DONATUR PADA KOMUNITAS 1000 GURU KALIMANTAN BARAT', 11(2), pp. 24–30.
- Jatika, P.L. and Putri, B.M. (2023) 'Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Pringsewu Berbasis Website (Studi Kasus Bkpsdm Kabupaten Pringsewu)', 4(September), pp. 342–348.
- Khaerunnisa, N. *et al.* (2020) 'WEB-BASED ADMINISTRATION POPULATION SERVICE INFORMATION SYSTEM CASE STUDY OF SIDAKANGEN VILLAGE , PURBALINGGA', 1(1), pp. 25–32.
- Kristiyanti, D.A. *et al.* (2021) 'Peningkatan Kinerja Kader Posyandu Desa Cogra Kabupaten Bogor melalui Sistem Informasi Pelayanan Posyandu (SIPANDU) Berbasis Web', *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), pp. 6–13. Available at: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/582>.
- Ni Putu Nadia Kartika Dewi, Eddy Muntina Dharma and A.A. Istri Ita Paramitha (2023) 'Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Dan Pengelolaan Persediaan Pada Pt Alfajores Bali Enak Menggunakan Metode Waterfall', *Smart Techno (Smart Technology, Informatics and Technopreneurship)*, 5(1), pp. 59–64. Available at: <https://doi.org/10.59356/smart-techno.v5i1.80>.
- Safudin, M. and Yulianto, E. (2019) 'Rancang bangun Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Web Pada Desa Sambeng Kulon Kabupaten Banyumas', 5(1), pp. 95–103.
- Setiani, P. *et al.* (2021) 'Perancangan sistem informasi pelayanan penduduk berbasis website di rw 010 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari - Jakarta Barat', 1, pp.

20–35. Available at: <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i1.414>.

Setiawan, F. (2023) 'Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian', *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 7(1), pp. 48–58. Available at: <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>.

Vicky, M., Hasri, A. and Sudarmilah, E. (2021) 'Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran Web-Based Application of Information System for Population Administration Services in Banaran Village', 20(2), pp. 249–260. Available at: <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056>.

Widiastuti, I. (2022) 'Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Wanajaya Jawa Barat', *Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(September), p. 887. Available